

HISTORY OF DEVELOPMENT OF POST REFERENDUM TIMOR LESTE 2002 -2017

Giri Handito Mahatera *, ***Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si *****, ***Bunari, S.Pd M.Si ******

*Email: girihandito@gmail.com, bedriatiibrahim@gmail.com, Bunari1975@gmail.com,
Cp: 082386399693*

*History Education Study Program
Department of Social Sciences Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *Timor Leste is a new country in the world and is a former province in Indonesia. In 1997 held a referendum and succeeded in becoming an independent country in 2002. Various types of conflicts occurred before and after East Timor broke away from Indonesia. As a new country, the development of Timor Leste needs to be observed both in terms of its social, economic and political conditions, as well as cooperation carried out with other countries, especially Indonesia as the closest neighboring country to support the continued establishment of Timor Leste. By conducting research using the literature study method, this study discovers what developments have occurred in Timor Leste after the referendum.*

Key Words: *Development, Timor Leste, Referendum.*

SEJARAH PERKEMBANGAN TIMOR LESTE PASCA REFERENDUM 2002 -2017

Giri Handito Mahatera *, Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si **, Bunari, S.Pd M.Si ***

Email: girihandito@gmail.com, bedriatiibrahim@gmail.com, Bunari1975@gmail.com,
Cp: 082386399693

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Timor Leste adalah negara baru di dunia dan merupakan bekas salah satu propinsi di Indonesia. Pada tahun 1997 mengadakan referendum dan berhasil menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 2002. Berbagai macam konflik terjadi sebelum dan sesudah Timor leste memisahkan diri dari Indonesia. Sebagai sebuah negara baru perkembangan timor leste perlu diamati baik dari segi kondisi sosial , ekonomi dan politiknya, juga kerjasama yang dilakukan dengan negara lain khususnya Indonesia sebagai negara tetangga terdekat guna menopang keberlangsungan berdirinya timor leste. Dengan melakukan penelitian menggunakan metode studi pustaka penelitian ini menemukan apa saja perkembangan yang terjadi pada Timor Leste setelah referendum.

Kata Kunci : Perkembangan, Timor Leste , Referendum.

PENDAHULUAN

Timor Leste atau yang dulu disebut sebagai Propinsi Timor Timur adalah sebuah negara kecil baru di Asia Tenggara yang berhasil merdeka dari Indonesia berdasarkan jejak pendapat yang diadakan Pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Timor Leste memiliki luas wilayah 18.899 Km², terletak di timur Pulau Timor.¹ Dahulu Timor Leste berada di bawah kekuasaan Portugal selama empat abad. Kekuasaan ini runtuh akibat adanya Revolusi Bunga yang terjadi di Portugal. Revolusi Bunga mencapai puncaknya pada tanggal 25 April 1974. Revolusi Bunga dipelopori oleh perwira muda yang tergabung dalam *Movimento das Forças Armadas* (MFA) atau Gerakan Angkatan Bersenjata.² Revolusi bunga merupakan alasan Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur. Setelah terbentuk pemerintahan transisi masyarakat Timor Timur pun langsung berinisiatif mendirikan partai-partai politik.³ Partai-partai dari berbagai ideologi dan berbagai orientasi politik yang berbeda mulai berdiri di Timor Timur yakni *Uniao Democratica Timorese* (UDT) menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal, sedangkan *Associação Popular Democrática Timorese* (APODETI) menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, dan *Frente Revolucionária de Timor 4 Leste Independente* (FRETILIN) menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar.⁴

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif cara atau teknik.⁵ Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis, yang dapat digunakan untuk mendekati permasalahan yang berhubungan dengan Sejarah Perkembangan Timor Leste Pasca Referendum dari tahun 2002–2017. Metode historis adalah upaya mengungkap/mengkaji arti dan hubungan kehidupan umat manusia berdasarkan dokumen ilmiah yang dihasilkan oleh pendahulunya atau dokumen sejarah.⁷

¹ Geoffrey C. Gunn, *500 Tahun Timor Lorosae*, (Yogyakarta: INSIST Press,2005), hal. 21

² Daud Aris Tanudirjo dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hal. 521

³ Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Cires FISIP UI, hal. 188.

⁴ <http://www.kompasiana.com/mozesadiguna/masa-integrasi-adalah-masa-terindah-bagi-timortimur> (Jakarta: 07 Maret 2013). Diakses 19 September 2018 pukul 20.10 WIB .

⁵ Suharto dkk. 2004. *Perekayasaan Metodologi Penelitian*. hal. 98

⁶ Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady, *op. cit.* hal. 42

⁷ Suharto dkk, *op. cit.* hal. 99

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timor Leste Sebelum Referendum

Sejak 1945, sipil atau konflik internal lebih banyak terjadi di dunia dari pada konflik antar negara atau internasional. Akan tetapi, pentingnya mempelajari konflik internal ini, dari perspektif global, baru mulai dilakukan pasca berakhirnya perang dingin. Sejak 1990, mulai banyak perkembangan di bidang riset-riset terkait konflik bersenjata internal atau sipil, yang berfokus pada faktor etnis, lingkungan, politik, dan ekonomi.⁸

Timor Timur, disingkat Timtim (sekarang Timor Leste), merupakan bekas wilayah jajahan Portugal, yang mana pada tahun 1974 Portugal mengakhiri pendudukannya di sana.⁹ Dua tahun setelahnya, Indonesia menginvasi Timtim dan dijadikan provinsi ke-27 negara tersebut. Populasi Timtim berjumlah sekitar 1.040.900 jiwa dengan utamanya beragama Katolik. Timtim mendapat pengakuan internasional atas kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, dua tahun setelah referendum dilakukan tahun 1999, dan setelah ±24 tahun menjadi bagian dari Indonesia. Aktor-aktor yang secara jelas berkonflik dalam kasus ini adalah antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Timor Timur yang menginginkan kemerdekaannya. Dua aktor tersebut dikelompokkan sebagai aktor utama yang secara jelas dapat dilihat sedang berkonflik. Sedangkan aktor sekundernya (tidak langsung) adalah Australia yang awalnya berperan sebagai mediator, tetapi ternyata dalam perjalanannya, malah menjadi motor dan ikut-ikutan secara tidak langsung membantu pihak Timtim untuk mendapat kemerdekaannya (*securitizing actor*).¹⁰

Securitizing actor adalah pihak yang berada di luar pihak yang berkonflik (*third party*), akan tetapi menggunakan pengaruhnya untuk memporvokasi salah satu pihak yang berkonflik, dan membuat konflik yang terjadi mengalami eskalasi. Dalam konflik ini, objek konfliknya adalah pemerintah Indonesia, di mana mereka menjadikan penduduk Timtim sebagai subjek konflik. Penduduk dibantai, rumah-rumah dan tempat produksi warga dihancurkan, pemerkosaan, pemenjaraan tanpa bukti, dan pastinya pelanggaran hak asasi manusia berat. Sedangkan, Australia bukanlah aktor langsung yang terlibat, tetapi memiliki peran krusial terkait pemisahan Timtim nantinya.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Timor Leste Pasca Referendum

1. Kondisi Sosial Timor Leste Pasca Referendum

Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat (Barika, 2012). Ketimpangan merupakan suatu kondisi yang tidak seimbang antara distrik yang satu

⁸ Dan Smith.2004.*Trends and Causes of Armed Conflict (Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management)*.hal. 5.

⁹ Peter Carey dan G. Carter Bentley (ed.).1995. *East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation (New York: Social Science Research Council)*.hal. 1-4

¹⁰http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=10. Diakses tanggal 06 Maret 2019. 14:02

dengan distrik yang lain. Hierarki 1 merupakan distrik dengan tingkat perkembangan paling maju, dicirikan oleh indeks distrik paling tinggi dan ditentukan oleh jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hierarki distrik dengan tingkat perkembangan sedang ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana yang tersedia di distrik tersebut lebih sedikit dari Hierarki 1. Hierarki 3 ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana yang tersedia di distrik tersebut relative sangat kurang dan jarak dari masing - masing distrik terhadap pusat - pusat pelayanan relative jauh sehingga untuk mengakses pusat - pusat pelayanan relative lebih sulit dibandingkan dengan distrik yang ada pada hierarki 1 dan hierarki 2.

2. Kondisi Ekonomi Timor Leste Pasca Referendum

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002, Timor Leste menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastrukturnya, memperkuat pemerintahan sipil, dan menghasilkan lapangan kerja bagi kaum muda yang memasuki angkatan kerja. Pengembangan sumber daya minyak dan gas lepas pantai sangat melengkapi pendapatan pemerintah.

Minyak menyumbang lebih dari 90% pendapatan pemerintah, dan turunnya harga minyak pada tahun 2014-2016 telah menyebabkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang dari pengeluaran pemerintah. Timor Leste mengkompensasi penurunan harga dengan mengeksport lebih banyak minyak.¹¹

Timor Leste telah menerima pendapatan dari minyak dan gas bumi sejak tahun 2005 sebagai proyek besar di Joint Petroleum Development Area yang dimiliki Timor-Leste dengan Australia. Pemerintah membentuk Dana Perminyakan khusus pada tahun 2005 untuk memastikan penggunaan pendapatan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Aset Dana Perminyakan mencapai \$ 8,3 miliar di tahun 2011.¹²

3. Kondisi Politik Timor Leste Pasca Referendum

1. Sistem Pemerintahan

Republik Demokratik Timor Leste merupakan sebuah negara yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dan merupakan negara termuda yang berada di Asia Tenggara. Akan tetapi di tahun yang sama dengan kemerdekaannya negara ini telah menjadi anggota PBB ke 161.

Republik Demokratik Timor Leste menganut bentuk pemerintahan semi presidensial. Dimana Kepala Negara adalah seorang presiden, yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan lima tahun. Presiden menjamin penghormatan terhadap Konstitusi dan Institusi Negara, serta dapat bertindak sebagai mediator untuk resolusi yang nyata. Dia juga dapat menggunakan hak untuk memveto undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh Parlemen Nasional. Sebagai Kepala Negara Presiden juga memimpin Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan.¹³ Sedangkan Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi

¹¹ http://www.indexmundi.com/timor-leste/economy_profile.html. Diakses tanggal 08 Mei 2019. 13:38

¹² <https://www.globalsecurity.org/military/world/timor/economy.htm>. Diakses tanggal 08 Mei 2019. 13:40

¹³ <http://timor-leste.gov.tl/?p=33&lang=en>. Diakses tanggal 08 Mei 2019. 12:34

mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.¹⁴

Parlemen Timor Leste yang unikameral yaitu Parlemen Nasional atau *Parlamento Nacional*, dimana anggotanya juga dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun. Jumlah kursi dapat bervariasi dari minimal 52 sampai maksimum 65. Semua partai politik yang sah dapat mencalonkan diri ke pemilihan legislatif, sehingga mengatur daftar kandidat mereka ke Parlemen Nasional. Pemerintah adalah badan pelaksana Negara dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan Program Pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun.¹⁵

2. Sistem Elektoral

Berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, dalam melakukan pemilihan umum baik untuk pemilihan Presiden maupun Perdana Menteri, Timor Leste melakukannya dengan pemilihan umum dilakukan dengan langsung, bebas, rahasia dan personal yang melibatkan seluruh masyarakatnya yang berusia 18 tahun keatas.¹⁶ Adapun masa jabatan dari Presiden maupun Perdana Menteri masing-masing 5 tahun dan dapat mengikuti 2 kali periode pemilihan berturut-turut.

3. Sistem Kepartaian

Timor Leste merupakan negara yang menganut multi-partai yang demokratis. Saat ini tercatat ada 14 partai politik yang berada di Timur Leste yaitu :¹⁷

a. Front Revolusioner untuk Timor Timur yang Merdeka (*Frente Revolucionária do Timor Leste Independente (FRETILIN)*)

Partai ini memulai sebagai gerakan perlawanan yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Lorosa'e, yang pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia, antara tahun 1974 dan 1998. Awalnya disebut Asosiasi Sosial Demokrat Timor Leste (ASDT). Setelah Timor Lorosa'e memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia, FRETILIN menjadi salah satu dari beberapa pihak yang bersaing memperebutkan kekuasaan dalam sistem multi partai.

FRETILIN adalah pemain utama baik militer maupun perjuangan politik untuk mandiri. Banyak tokoh terkenal tinggal di pengasingan, terutama di Mozambik selama pendudukan Indonesia. Mari Alkatiri, anggota senior misi diplomatik Timor Leste dan seorang ekonom yang dihormati, yang saat ini menjadi Perdana Menteri. Francisco "Lu Olo" Guterres adalah Presiden saat ini yang dimana telah memenangkan pemilihan.

FRETILIN memegang 30 persen kursi di parlemen saat ini,¹⁸ partai ini memiliki keuntungan untuk tampil baik dalam pemilihan karena keanggotaan yang kuat.

¹⁴ *ibid.* timor-leste.gov.tl.

¹⁵ *ibid.* timor-leste.gov.tl.

¹⁶ <http://www.etan.org/etanpdf/pdf2/cnbh0202.pdf>. Diakses tanggal 08 Mei 2019. 12:55

¹⁷ <http://hi015.blogspot.com/2017/11/sistem-politik-dan-pemerintahan-timur.html> Diakses tanggal 08 Mei 2019. 13:32

¹⁸ <http://www.mediaindonesia.com/news/read/114275/menangi-pemilu-fretilin-siap-berkoalisi/2017-07-24>. Diakses tanggal 08 Mei 2019. 13:05

Di seluruh negeri, mereka juga memiliki struktur partai yang lebih baik dari pada partai lainnya. Hubungan FRETILIN dengan beberapa ideologi Marxis-Leninis telah membawa negara ini ke dalam perubahan sosial, politik dan ekonomi yang radikal dan dianggap paling progresif di wilayah ini.

b. Partai Demokrat (*Partido Democrático*)

Didirikan pada tanggal 10 Juni 2001. Saat ini, sebagian anggota partai tersebut adalah generasi muda yang sedang belajar di luar negeri, seperti Indonesia, Norwegia, Portugal, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Pada kebijakan luar negeri, PD mencari hubungan regional yang lebih baik dengan negara-negara tetangga dan ASEAN, yang bertujuan untuk investasi asing lebih lanjut dan liberalisasi pasar. Pada Pemilihan yang telah dilaksanakan tahun ini, partai memperoleh 10.2 persen suara di parlemen.

4. Krisis Politik Timor Leste Tahun 2006 – 2008

Perubahan politik diberbagai Negara setelah terjadinya kudeta militer yang dikenal dengan Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974 secara langsung juga mempengaruhi perubahan politik di Negara Timor Timur. Pergeseran kekuasaan menimbulkan gagasan baru untuk memutuskan program dekolonisasi bagi wilayah-wilayah jajahan bangsa Eropa termasuk Timor Timur. Permasalahan dekolonisasi di Timor Timur menghasilkan perundingan - perundingan yang ditempuh guna menyepakati hal-hal yang akan dilakukan untuk menentukan masa depan Timor Timur.¹⁹

Kudeta militer adalah salah satu manuver politik ekstrem yang bisa dialami negara manapun. Elit tentara, entah didukung rakyat atau tidak, mengambil alih pemerintahan karena perbedaan visi. Tentara memaksimalkan keuntungan sebagai pemegang senjata resmi, untuk mempengaruhi atau malah merebut kekuasaan.²⁰

Hal tersebut di atas akhirnya berakibat pada konflik yang terjadi di bulan April 2006 merupakan konflik yang berawal dari permasalahan yang muncul di dalam tubuh institusi militer *Falintil-Forca Defeza de Timor-Leste* (F-FDTL). Sebab-sebab munculnya permasalahan dipicu dugaan adanya praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer terhadap para anggotanya.²¹ Namun, tidak semua upaya kudeta berhasil. Seringkali tentara gagal merebut simpati rakyat saat merebut pemerintahan. Hasilnya tak cuma gagal total, tentara yang terlibat pun rentan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup karena berkhianat.

Peranan dan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Timor Leste Setelah Referendum

¹⁹ P. Gregor Neonbansu, 1997, *Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor Timur*, Jakarta: Yanense Mitra Sejati, hlm. 47.

²⁰ Hanggoro. 2016. “Kudeta militer gagal paling dramatis dalam sejarah modern” diakses pada <https://www.merdeka.com/dunia/5-kudeta-militer-gagal-paling-dramatis-dalam-sejarah-modern.html> tanggal 10 Mei 2019. 13.01

²¹ *Laporan Hasil Investigasi oleh Komisi Independen* bulan Oktober 2006 diperoleh dari: <http://suar.okezone.com/read/2008/02/16/58/84046/pelajaran-konflik-timor-leste>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2019. 13:03

Jika dilihat berdasarkan lokasi, Timor Leste berdekatan dengan dua negara yaitu Indonesia dan Australia tetapi diantara kedua negara tersebut Timor Leste lebih dekat dengan Indonesia secara batas karena memiliki batas darat. Timor Leste melakukan kerjasama dengan begitu banyak negara tetapi tetap memilih Indonesia menjadi bagian terpenting di dalam kerjasama bilateralnya terlepas dari permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste. Kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste sudah terjadi sejak Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia namun banyak permasalahan pasca melepaskan diri dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, permasalahan tentang penyelesaian isu mengenai garis batas negara sehingga dapat diterapkan sistem pas lintas batas yang disepakati oleh kedua negara secara bersama mengingat bahwa lintas batas masuk dalam kategori wilayah sebuah negara. Suatu negara yang merdeka memerlukan wilayah yang pasti secara hukum karena merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara, kedua, penyampaian komunikasi secara efisien antara pemerintah dan aparat keamanan di kedua belah pihak pada semua tingkatan. Adanya rasa trauma yang besar dari masyarakat Timor Leste akibat konflik saat jajak pendapat yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste menyebabkan Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan Timor Leste di dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dari kedua negara ini dan yang ketiga, meningkatkan kerja sama di berbagai bidang terutama terkait pelatihan dan pertukaran pengetahuan. Mengingat Timor Leste adalah negara yang benar-benar baru dan membutuhkan perkembangan SDM dan SDA yang banyak sehingga menarik perhatian dari Indonesia untuk bisa terlibat di dalam kerjasama bilateral ini.²²

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan memaparan secara panjang lebar mengenai bagaimana kondisi Timor Leste pasca referendum, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pada masa sebelum referendum terjadi banyak konflik antara Indonesia dengan Timor Leste yang disebabkan oleh keinginan yang kuat dari pihak Timor Leste untuk lepas dari Indonesia, hal itu mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah yang sampai menarik perhatian dunia karena jumlah korban yang tidak sedikit, dan di indikasi terjadi pelanggaran HAM didalamnya. Pada akhirnya yaitu pada tahun 1999 diadakan pemungutan suara yang hasilnya adalah kemenangan untuk masyarakat Timor Leste yang menginginkan lepas dari Indonesia.

²² <http://setkab.go.id/indonesia-timor-leste-meneguhkan-komitmen-untuk-konsisten/> . Diakses tanggal 05 Mei 2019. 02:50

2. Pada masa setelah referendum, ternyata perkembangan timor leste tidak semulus yang direncanakan , kesenjangan sosial, pendidikan, dan sarana prasarana masih banyak terjadi ditiap-tiap daerah, bahkan sampai terjadi aksi kudeta militer ditahun 2006 -2008 walaupun kudeta itu gagal, namun itu adalah bukti bahwa intern dari Timor Leste sedang dalam masalah.
3. Timor Leste banyak menjalin kerja sama dengan negara tetangga demi menguatkan stabilitas dalam negeri secara keseluruhan, terutama dengan Indonesia yang merupakan negara tetangga terdekatnya. Banyak perjanjian yang dibuat baik itu ekonomi, politik, pendidikan, telekomunikasi dan lain sebagainya guna menopang memajukan Timor Leste.
4. Masih banyak yang harus dilakukan oleh Timor Leste untuk menjaga eksistensinya sebagai sebuah negara didunia, terutama terkait konflik dalam negeri yang bisa mengakibatkan bubarnya negara tersebut. Terutama pada ekonomi dan politik.

Rekomendasi

Dari uraian diatas maka penulis menyarankan :

1. Bagi pemerintah Timor Leste sebaiknya berbenah terhadap pemerintahannya dan kebijakan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi aksi - aksi yang membahayakan keadaan negaranya seperti yang terjadi pada tahun 2006 yaitu kudeta militer.
2. Lebih meratakan pembangunan di seluruh negeri jangan hanya berpusat di daerah yang menjadi pusat pemerintahan sedang daerah lain seperti di anak tirikan, karena hal itu bisa memancing kecemburuan sosial dari daerah yang merasa di anak tirikan.
3. Jalin lebih banyak lagi kerjasama dengan negara - negara yang ada didunia agar dapat memperkokoh stabilitas negara dalam segala bidang. Bukan hanya ekonomi dan politik tapi juga pada sektor lain seperti pendidikan, budaya, infrastruktur dan lain sebagainya.
4. Bagi masyarakat Timor Leste sebaiknya saling dukung dan membantu pemerintahan yang ada dengan segala upaya karena negara mereka adalah hasil dari keinginan mereka sendiri untuk berdiri sebagai sebuah negara merdeka, karena membangun sebuah negara tidaklah semudah membalikan telapak tangan, itu semua butuh proses panjang dan kecermatan serta kesabaran dari pemimpin dan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Geoffrey C. Gunn.2005. *500 Tahun Timor Lorosae*. Yogyakarta: INSIST Press
- Daud Aris Tanudirjo dkk.2011. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve
- Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Cires FISIP UI
- A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Zacky Anwar Makarim, dkk.2003. *Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian*. Jakarta: PT. Sportif Media Infomasindo
- Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna.2000. *Indonesia di Ambang Perpecahan?*. Jakarta
- PBB.2000. *Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat*. New York: Deppen Publik PBB
- Kompas, Edisi 1 Februari 1999.
- B.J Habibie.2006. *Detik-Detik yang menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo setiady. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gazalba, Sidi.1981.*Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*.Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Hugiono dan Poerwantana, P.K. 1992.*Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil, C.S.T. 2001. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*.Jakarta: P.T. Pradya Paramita